

Sistem Operasional Perbankan Syariah

Aisah Manilet

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah

Muh. Nurjihad

Pemulihan Ekonomi Maluku Pasca Konflik
(Suatu Pendekatan Teoritis pada *Economica Choice*)

Mohammad H. Holle

Sebuah Tawaran tentang Fikih Prioritas

Idris Karepesina

Negara dan Syariat Islam : Antara Harapan dan Kenyataan

Abd. Jabar Abdu

T **Jurnal Syariah dan Hukum** **TAHRIQ**

FAKULTAS SYARIAH IAIN AMBON

PENGELOLA JURNAL TAHKIM

PENANGGUNG JAWAB

Ismail Rumadan

PEMIMPIN UMUM

Rajab

PEMIMPIN REDAKSI

Rajab

REDAKTUR PELAKSANA

Hj. Hadidjah T.

Muhammad M.

H. Anang Kabalmay

M. Zein Nuhuyanan

Husen Maswara

La Jamaa

DISTRIBUSI

St. Hawa

Alamat Redaksi

Kantor Fakultas Syariah IAIN Ambon

Jl. Dr. H. Tamizi Taher Kebun Cengkeh

Ambon - Maluku

Telp. 0911-3308143

Email : Jurnal_tahkim@yahoo.co.id

DAFTAR ISI

iii - viii	Dari Redaksi
1 – 16	Sistem Operasional Perbankan Syariah <i>Aisah Manilet</i>
17 – 38	Problematika <i>Murabahah</i> di Perbankan Syariah <i>Djumadi Djunaidi</i>
39 – 60	Konstruksi Hukum <i>Murabahah</i> di Perbankan Syariah <i>M. Ridwan</i>
61 – 80	Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah <i>Muh. Nurjihad</i>
81 – 94	Pemulihan Ekonomi Maluku Pasca Konflik (Suatu Pendekatan Teoritis pada <i>Economica Choice</i>) <i>Mohammad H. Holle</i>
94 – 104	Studi Atas Hadis Walimah Perkawinan <i>Muhammad Taib Kelian</i>
105 – 118	Revitalisasi Peran <i>Hakamayn</i> dalam Perkawinan <i>Abdullah Latuapo</i>
119 – 140	Reproduksi Bayi Tabung dalam Perspektif Hukum Islam <i>Nur Alim Natsir</i>
141 – 151	Prospek Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia <i>Ismail Rumadan</i>
153 – 160	Sebuah Tawaran tentang Fikih Prioritas <i>Idris Karepesina</i>
161 – 168	Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan <i>Fauzia Rahawarin</i>
169 – 178	Negara dan Syariat Islam: Antara Harapan dan Kenyataan <i>Abdul Jabar Abdu</i>
179 – 189	<i>Ashabiyah</i> Menurut Ibnu Khaldun <i>M.A.A. Dzun Nuroyn</i>

Abstrak

Polemics around state ideology and Islamic shariah being discoursed until now. Pull and draws between ideas that good state must based on Islamic ideology and or nationalism ideology "secular" always takes place between conservatist and modernist. For Conservatist, Islam is religion and state ideology which must become basic of motion from all segment of human life including in having state. Meanwhile modernist argue that Islam is religion and do not arrange political problem. State, for modernist is neutral which included in earthly scope and ijthadiyah (reasonable). In Indonesia, the discourse still become crucial problem in many debates in parliament. But because of cultural Islam population here is very big, they don't agree with Islamic state. For them, what required is a political system which really democratic and fair that capable to guarantee all citizens prosperity and here actually the spirit of Islam lies on.

Kata Kunci : syariat Islame, idiologi, Islam Kultural

Negara dan Syariat Islam : Antara Harapan dan Kenyataan

*Abd. Jabar Abdu**

Pendahuluan

Sejak pertengahan abad ke XIX dan memasuki abad ke XX, dunia Islam diperhadapkan dengan berbagai dinamika pemikiran pada tataran sosio politik. Fasi ini umumnya dikenal sebagai pase kebangkitan (modern) setelah lebih dari enam abad dunia Islam mengalami stagnasi (kemunduran dan kejumudan) di dalam berbagai segmen kehidupan.¹

Manifestasi terpenting dari makna kebangkitan abad XX tersebut ditandai dengan dua fanomena manarik yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan pemikiran dan dinamika politik dunia Islam.

* Dosen Fakultas Syariah IAIN Ambon; Memperoleh gelar Magister Pendidikan (M.Pd.) dari Universitas Negeri Makassar (UNM).

¹Lihat Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987).

Pertama, adanya kesadaran identitas bahwa dunia Islam dalam masa yang begitu panjang (6 abad) telah tertidur panjang, dan dalam kondisi itu mereka telah dijajah hak-hak kemerdekaannya serta dieksploitatif negerinya oleh bangsa-bangsa barat. Dengan demikian mereka harus bangkit bercermin dan melakukan berbagai pembenahan terhadap cara pandang mereka akan ajaran Islam baik secara doktrinal, maupun sosiopolitik dan kultural. Yang *kedua*, dengan adanya kesadaran identitas tersebut, muncul keinginan dunia Islam (negeri-negeri) Islam untuk membebaskan diri dari hegemoni kolonialisme barat. Keinginan itu kemudian termanifestasikan dalam bentuk munculnya perjuangan kemerdekaan negeri-negeri Islam. Dan seperti diketahui, di sekitara pertengahan abad XX, umumnya negeri-negeri Islam telah menyatakan kemerdekaannya.²

Problema menarik yang umumnya dihadapi oleh negara-negara Islam yang baru menyatakan kemerdekaannya itu adalah kesulitan untuk melakukan artikulasi ajaran Islam pada tataran negara bangsa (*nation state*). Seperti diketahui Kolonialisme yang masuk ke dunia Islam pasca revolusi industri abad ke XVII dan XVIII membawa gagasan-gagasan baru seperti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, modernisasi dan yang lebih penting dikemukakan di sini adalah ideologi kebangsaan atau faham negara bangsa (nasionalisme).³

Ideologi nasionalisme yang diselundupkan dari barat tersebut tampaknya merupakan sesuatu yang baru di dunia Islam dan tentu antagonis dengan faham *khilafah* (kepemimpinan universal) yang telah melembaga di dunia Islam. Dalam perspektif tersebut dunia Islam sangat terpengaruh dengan faham kebangsaan ini. Buktinya, sistem kepemimpinan dunia Islam (*Khilafah*) kemudian kehilangan elan vitalnya. Ke-khalifah-an Turki Usmani yang merupakan pemegang supremasi kekuasaan dunia Islam waktu itu tidak efektif bertahan dengan derasnya faham kebangsaan ini.⁴ Sistem *Khilafah* selanjutnya runtuh melalui tangan dinginnya Mustafa Kemal Attaturk melalui revolusi Turki tahun 1924.⁵ Turki akhirnya menjadi negara bangsa

²Untuk informasi lebih lanjut, lihat Edward Mortimer, *Islam and Power*, Trj. Oleh, Ihsan Ali Fauzi, (Bnadung: Mizan, 1985), h. 13-15.

³Harun Nasution, *Op. Cit.*, h. 4. Lihat juga, John L. Esposito, *Islam and Development: Religion and Sociopolitical Change*, (New York: Syracuse University Press, 1980), h. 3-18.

⁴Lebih lanjut mengenai perkembangan pembaruan Islam di Turki, baca, Harun Nasution, *Ibid*, khususnya bab mengenai pembaharuan di Turki. Selanjutnya lihat juga, H. A. Mukti Ali, *Islam dan Sekularisme di Turki Modern*. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992).

⁵Lihat Nurcholish Madjid, *Sekularisasi: Belajar dari Turki dan Jepang*", dalam Donald Eugene Smith, *Religion and Secularism*, terj, oleh Adzumardi Azra

dan lebih ironis lagi memproklamkan dirinya menjadi negara sekuler. Dari sini pemikiran politik Islam mulai memasuki babak baru dan lebih krusial.

Dinamika Pemikiran Politik Islam Pacea Khilafah

Pasca Revolusi Turki, polemik-polemik di sekitar ideologi negara dari negeri-negara yang baru dan sedang merintis kemerdekaannya terus mewacana. Tarik menarik antara pemikiran bahwa negara yang baik harus berdasarkan pada ideologi Islam (tegasnya melaksanakan Syari'at Islam) ataukah pada ideologi nasionalisme yang cenderung "sekuler" terus berlangsung antara kelompok konservatif dan kelompok modernis. Bagi kalangan konservatif Islam adalah agama sekaligus ideologi negara yang harus menjadi landasan gerak dari seluruh segmen hidup manusia termasuk di dalamnya urusan bernegara. Sementara itu kalangan modernis berpandangan bahwa Islam adalah agama dan bukan mengatur masalah kenegaraan. Negara, bagi kalangan modernis adalah sesuatu yang netral yang termasuk dalam wilayah duniawi dan ijthadiyah.⁶

Hasil dari diskursus tersebut, kini kita melihat setidaknya terdapat tiga prototipe dari bentuk-bentuk negara Islam di dalam memaknai model negaranya. *Pertama*, negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam tapi Islam tidak dijadikan ideologi negara, bahkan Islam tidak dilibatkan dalam urusan negara. Lebih dari itu dalam konstitusinya di sebut negara sekuler. Turki dalam hal ini merupakan contoh untuk tipe pertama ini.

Kedua, Prototipe dari negara Islam yang jelas dan secara tegas menyatakan di dalam konstitusinya sebagai negara Islam, atau Islam dan hukum Islam dijadikan dasar di dalam penyelenggaraan negara. Pakistan, Arab Saudi, Iran adalah contoh untuk tipe ini. Kemudian yang *ketiga*, Negara yang mayoritas penduduknya Islam namun Islam tidak dijadikan ideologi negara dan juga menolak sekularisme. Islam diposisikan sebagai suatu kekuatan riil yang mengkultur. Indonesia adalah contoh untuk tipe ini.⁷

dengan judul; *Agama Di Tengah Sekularisasi Politik*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), h. vi-xxi.

⁶Kajian menarik dalam hal ini dapat di lihat dalam, Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam, Op.Cit.* Lihat juga, Ali Abd Al-Raziq, *Al-Islam wa Ushulil Hukmi*, (Kairo: Dar al-Kutb, 1966). Bandingkan juga dengan Abul A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, Terj. (Bandung: Mizan, 1984). Lihat juga buku Maududi yang lain, *Khilafah dan Kerajaan*, Terj. (Bandung: Mizan, 1986). Baca juga Nazez Ayubi, *Political Islam: Religion and Politics in the Arab World*, (New York: Routledge, 1991).

⁷Lihat, Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata negar*, (Jakarta: UI Press, 1992), h. 3. Bandingkan juga dengan Nazez Ayubi, *Ibid*, h. 1-34.

Kita tentu memiliki keterbatasan ruang untuk mengulas lebih jauh mengenai perkembangan perkembangan mutakhir di seputar ketiga model varian negara-negara Islam seperti dikemukakan di atas. Namun yang perlu dikatakan di sini bahwa wacana negara Islam dalam perspektif empiris masih sulit mencapai titik idealnya. Di Pakistan Yang memproklamirkan negaranya sebagai Republik Islam, ternyata di negara ini "Islam" masih sulit didefinisikan.⁸ Kelompok konservatis yang dimotori oleh Abul A'la al-Maududi terus berisitegang dengan kelompok modernis dari kalangan pengikut Fazlur Rahman.

Dari perspektif historis, negara Islam (kalau bisa dikatakan demikian) yang paling ideal hanya ada pada pemerintahan nabi di Madinah dan sedikit pada masa pemerintahan *al-khulafa' al-Rasyidun*, khususnya masa Abu Bakar al-Shiddiq. Pasca fase ini, sistem kekuasaan negara dari masa yang paling dini dari sejarah Islam telah diwarnai oleh intrik dan berbagai pergolakan politik. Kita mencatat dari ke-empat al-Khulafa' al-Rasyidun, hanya Abu Bakar yang wafat secara wajar. Ketiga Khalifah yang lain (Umar, Utsman dan Ali) meninggal dengan cara mengenaskan, yaitu dibunuh oleh para pemberontak yang berdarah dingin. Inilah awal skisme (*al fitnah al-kubra* – ujian besar) yang melanda umat Islam.⁹

Dari konstalasi politik Islam awal ini terbaca bahwa Islam tidak memiliki sebuah konsep final mengenai negara dan sistem ketatanegaraan. Kendatipun demikian, Islam memuat seperangkat prinsip dasar mengenai bagaimana kekuasaan negara itu harus bekerja. Prinsip-prinsip itu antara lain; Prinsip tauhid, prinsip keadilan, egalitarianisme, demokratis, dan pluralitas.¹⁰ Prinsip-prinsip ini sangat ditekankan Islam terhadap kekuasaan, namun masih terus mengundang perdebatan. Di satu pihak bagi kelompok ideologis berpandangan bahwa hanya dengan negara Islamlah prinsip-prinsip tersebut bisa ditegakkan. Sedangkan kelompok modernis berpandangan prinsip-prinsip tersebut dapat saja ditegakkan tanpa harus sebuah negara berlandaskan Islam (hukum Islam).

⁸Lihat John L. Esposito, ed. *Islam end Politics*, (New York, Syracuse University Press, 1984), h. 142 dst. Baca juga H. A. Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Moderen: India dan Pakistan*, (Bandung: Mizan, 1988).

⁹Lebih lanjut mengenai masalah skisma, lihat, Nurcholis Madjid, "Skisme dalam Islam: Tinjauan Singkat Secara Kritis-Historis Terhadap proses Dini Perpecahan Sosial Keagamaan Islam" dalam, Budi Munawar Rahman, ed. *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta: Paramadina, 1994), h. 668-690. Lihat juga tulisan Jalaluddin Rahmat dalam buku yang sama, "Skisme dalam Islam: Sebuah Telaah Ulang", halaman, 692 dst.

¹⁰Lihat Munawir Sjadzali, *Op. Cit.*, h. 4.

Syari'at Islam: Sebuah Perdebatan yang Melelahkan

Dalam konteks ke-Indonesia-an, tarik-menarik antara pandangan mengenai negara Islam dan negara nasional tampaknya mewacana sejak awal munculnya nasionalisme Indonesia. Yakni sejak munculnya Sarekat Dagang Islam (SDI) tahun 1911 yang kemudian mendapat antitesa dari kelompok nasionalis muda yang tergabung dalam Perhimpunan Indonesia.¹¹

Kristalisasi dari polemik-polemik mengenai dasar negara (antara Islam dan Nasional) semakin mengerucut pada paruh pertama tahun 1945, yaitu sekitar bulan Mei sampai dengan awal Agustus 1945. Akhirnya Panitia Persiapan Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang ditunjuk untuk merumuskan Dasar Negara dan menyusun Undang-undang Dasar berhasil mencapai kompromi untuk mengakomodir Syari'at Islam ke dalam konteks kenegaraan Indonesia. Kompromi politik ini kemudian dikenal dengan "Piagam Jakarta" atau Jakarta Carter.¹²

Sebuah gambaran kemenangan kelompok Islam terlihat dengan adanya "tujuh kata sakral" pada sila pertama Pancasila versi Piagam Jakarta tersebut. Namun disaat-saat menjelang lahirnya "bayi mungil" Indonesia, ketujuh kata itu akhirnya dicoret dari Piagam Jakarta. Ketujuh kata itu ialah ; "Dengan Kewajiban Menjalankan Syari'at Islam Bagi Pemeluknya", dan diganti dengan "Yang Maha Esa" (lengkapnya Ketuhanan Yang Maha Esa). Inilah kompromi politik antara kelompok Islam dan nasionalis untuk menghindarai perpecahan.¹³

Kompromi politik ini pada akhirnya kembali lagi dimentahkan tatkala pada dekade akhir tahun limapuluhan, presiden Soekarno membentuk Badan Konstituante yang dtugaskan untuk menyusun Undang-undang Dasar baru menggantikan UUD-1945. Saat-saat ini, wacana mengenai negara Islam atau Syari'at Islam sebagai dasar negara menjadi polemik dan perdebatan yang sangat menguras energi dan melelahkan.¹⁴

¹¹Menganai hal tersebut di atas, lihat misalnya, Deliar Nor, *Gerakan Modern Islam di Indonesia: 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES, 1996).

¹²Tentang Piagam Jakarta, lihat Endang Saifuddin Anshari, *Pigam Jakarta*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998).

¹³*Ibid.*, h. 45-60.

¹⁴Untuk informasi selengkapnya mengenai perdebatan dalam Konstituante, lihat Ahmad Syafi'iy Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi Mengenai Perdebatan dalam Konstituante*. (Jakarta: LP3ES, 1989).

Perdebatan kelompok Islam dengan kelompok nasionalis tidak dapat mencapai kata sepakat yang akhirnya berbuntut dengan Dekrit Presiden, 5 Juli 1959 yang intinya adalah kembali ke UUD-1945. Sejalan dengan itu kekuatan-kekuatan politik Islam mulai mendapat marginalisasi dari kekuasaan. Partai Masyumi dibubarkan oleh Soekarno, di samping itu konflik internal kekuatan-kekuatan politik Islam juga semakin meruncing.¹⁵

Pada masa awal Orde Baru, harapan untuk kembalinya kekuatan politik Islam semakin hadir pada kalangan elit politik Islam. Hal ini dikarenakan kekuatan-kekuatan Islam lebih banyak berperan di dalam tumbangnyanya rezim Orde Lama. Namun demikian, tampaknya Orde Baru juga memiliki pandangan yang berbeda terhadap Islam ideologi. Kekuatan-kekuatan politik Islam kemudian secara pelan dan pasti dibabat habis dalam perpolitikan Orde Baru.¹⁶ Di bawah Orde Baru, seluruh kekuatan politik kemasyarakatan yang dianggap progresif dan berpotensi kepada perpecahan ideologis, dipaksakan untuk menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas di dalam berpolitik maupun bermasyarakat.¹⁷ Dengan demikian dapat dikatakan semasa Orde Baru peran Islam politik yang ingin mengusung negara Islam mengalami kegagalan total, karena Orde Baru memiliki kekuatan represif untuk menindas setiap kekuatan oposisi.

Transformasi dari Islam Ideologi ke Islam Kultural

Gerakan Islam politik dengan format ideologis seperti tersebut di atas, dalam konteks tertentu ternyata tidak mudah mendapat apresiasi masyarakat, baik oleh kalangan umat Islam sendiri yang berpaham nasionalis maupun kalangan lain di luar Islam. Kegagalan-demi kegagalan dari gerakan Islam politik telah memunculkan kesadaran baru di antara sebagian aktifis Islam

¹⁵Tentang hal ini, lihat Deliar Nor, *Partai-Partai Islam di Pentas Nasional*, (Jakarta: Grafitti Press, 1991). bandingkan juga dengan; BJ. Boland, "Perjuangan Islam dalam Indonesia Modern" dalam Ahmad Ibrahim et.al, (ed.), *Islam di Asia Tenggara: Perkembangan Kontemporer*, (Jakarta: LP3ES, 1990) h. 9-21, dan juga tulisan Howard M Fedespiel, "Militer dan Islam Pada Masa Pemerintahan Soekarno di Indonesia" dalam buku yang sama, h 39- 56.

¹⁶Untuk informasi tentang Islam Inadonesia pada masa Orde Baru, lihat misalnya, Allan A. Samson, "Islam Indonesia Sejak Orde Baru", dalam Ahmad Ibrahim at.al, (ed.), *Islam di Asia Tenggara..., Op.Cit*, h. 71-82. Lihat juga, M. Rusli Karim, *Negara dan Peminggiran Islam Politik*, (yogyakarta: Tiara Wacana, 1999).

¹⁷Sebagai bahan bandingan lihat misalnya, Dewi Fortuna Anwar, Kaabah dan Garuda: Dilema Bagi Islam di Indonesia", dalam *Prisma*, No. 4. April 1984. h . 3-17, Bandingkan juga dengan, Fachry Ali dan Iqbal Abdurrauf Saimima, "Merosotnya Aliran dalam Partai Persatuan Pembangunan" dalam *Prisma*, No. 12, Desember 1981, h. 24-43.

yang ingin keluar dari wilayah politik dan memilih perspektif kultural sebagai arena perjuangan mereka.¹⁸

Sekitar tahun tujuh puluhan format gerakan Islam di Indonesia setidaknya mengalami beberapa pergeseran yang signifikan, dari gerakan yang awalnya ideologis kepada yang kultural intelektual. Pergeseran gerakan tersebut tampaknya tetap berpijak pada realitas objektif akan kegagalan-kegagalan Islam politik dalam perjuangannya selama ini. Muncul beserta gerakan baru itu tokoh-tokoh Intelektual-intelektual muda seperti Nurcholish Madjid, Ahmad Wahib, Dawam Rahardjo, Djohan Effendy dan lainnya, yang kemudian menawarkan gagasan tentang pentingnya pembaharuan Islam.¹⁹ Dalam pandangan cendekiawan-cendekiawan muda ini, bahwa format gerakan Islam harus ditinjau kembali sehingga mampu memberi perspektif baru yang lebih kultural, tidak harus dalam perspektif politik semata.

Dalam perkembangan selanjutnya, tawaran pembaruan pemikiran Islam yang dilontarkan Nurcholish dan teman-temannya tersebut mendapat sambutan yang luar biasa, khususnya para aktifis muda yang tercerahkan, walaupun pada tataran tertentu mereka masih juga sering mendapat kritikan dari kalangan aktifis Islam politik dan dalam konteks tertentu oleh kaum skripturalis Islam. Karena pandangan-pandangan kalangan pembaru ini sedikit banyaknya menguntungkan rezim Orde Baru ketika itu. Namun demikian kekuatan Islam kultural ini kemudian sangat mempengaruhi perubahan-perubahan signifikan di dalam format politik nasional menjelang berakhirnya rezim Orde Baru.

Tumbangnya rezim Orde Baru dari kekuatan-kekuatan reformis seperti dunia kampus, tampaknya memberi perspektif baru bagi munculnya kekuatan Islam ideologis yang hendak memperjuangkan negara Islam. Hal ini terlihat dengan begitu menjamurnya partai Islam di awal reformasi ini. Wacana Syari'at Islam masih terus menjadi persoalan krusial dalam berbagai perdebatan-perdebatan di parlemen. Akan tetapi persoalannya tidak sesederhana ini, kekuatan-kekuatan Islam kultural sudah dapat dikatakan merata. Mereka ini tidak menghendaki negara Islam. Kecuali itu yang dibutuhkan adalah sebuah sistem kenegaraan yang benar-benar adil

¹⁸Lihat Bachriar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Prakti Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1998), h. 125-164.

¹⁹ Tentang Pembaharuan Islam di Indonesia, lihat Nurcholish Madjid, *Islam Kemoderenan dan Keindonesiaan*, (Bandung, Mizan, 1993), h. 125, Baca juga, Muhammad Kamal Hasan, *Modernisasi di Indonessia: Respons Cendekiawan Muslim*, (Jakarta, Rajawali Pers, 1987).

demokratis yang mampu menjamin semua warga negara. Dan di sinilah sebenarnya spirit Islam.²⁰

Kesimpulan

Dalam konteks kekinian, debat mengenai negara Islam (Syari'at Islam) hanyalah merupakan debat yang menguras habis energi dan tidak menghasilkan sesuatu. Bahkan kebanyakan politisi Islam menggunakan wacana ini hanya sekedar sebagai cara untuk menarik simpati umat. Para pembawa bendera-bendera politik Islam harus lebih banyak bercermin dari perjalanan sejarah perpolitikan Indonesia. Dengan begitu isu-isu lama yang sudah memfosil sudah harus ditinggalkan. Tanpa menyebut negara Islam, agenda-agenda bangsa yang cukup menghadang dan tidak kurang muatan religiusitas keislamannya adalah keadilan, pemberantasan KKN, Hak asasi manusia (HAM), demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Bila agenda agenda ini berhasil diperjuangkan maka negara Indonesia yang ber Pancasila ini tidak kurang keislamannya dari negara-negara yang secara formal menjadikan Islam sebagai ideologi negara. Dengan demikian yang diharapkan adalah Islam harus menjadi sebuah "kekuatan etik" dan moral dalam menyelesaikan berbagai agenda besar bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H. A. Mukti *Islam dan Sekularisme di Turki Modern*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992.
- , *Alam Pikiran Islam Moderen: India dan Pakistan*, Bandung: Mizan, 1988.
- Ali, Fachry dan Iqbal Abdurrauf Saimima, "Merosotnya Aliran dalam Partai Persatuan Pembangunan" dalam *Prisma*, No. 12, Desember 1981.
- Al-Maududi, Abul A'la, *Sistem Politik Islam*, Terj. Bandung: Mizan, 1984.
- , *Khilafah dan Kerajaan*, Terj. Bandung: Mizan, 1986.
- Anwar, Dewi Fortuna, Kaabah dan Garuda: Dilema Bagi Islam di Indonesia", dalam *Prisma*, No. 4. April 1984.
- Anshari, Endang Saifuddin, *Pigam Jakarta*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Ayubi, Nazeem *Political Islam: Religion and Politics in the Arab World*, New York: Routledge, 1991.

²⁰Bandingkan dengan Nurcholis Madjid et. al, *Syari'at Islam Yes, Syari'at Islam No*, (Jakarta: Paramadina, 2000).

- Boland, BJ. "Perjuangan Islam dalam Indonesia Modern" dalam Ahmad Ibrahim et.al, (ed.), *Islam di Asia Tenggara: Perkembangan Kontemporer*, Jakarta: LP3ES, 1990
- Effendy, Bachtiar, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Prakti Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1998.
- Esposito, John L, *Islam and Development: Religion and Sociopolitical Change*, New York: Syracuse University Press, 1980.
- , ed. *Islam end Politics*, New York, Syracuse University Press, 1984.
- Fedespiel, Howard M."Militer dan Islam Pada Masa Pemerintahan Soekarno di Indonesia" dalam Ahmad Ibrahim et.al, (ed.), *Islam di Asia Tenggara: Perkembangan Kontemporer*, Jakarta: LP3ES, 1990
- Karim, M. Rusli, *Negara dan Peminggiran Islam Politik*, yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Kamal Hasan Muhammad, *Modernisasi di Indonessia: Respons Cendekiawan Muslim*, Jakarta, Rajawali Pers, 1987.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'iy, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi Mengenai Perdebatan dalam Konstituante*. Jakarta: LP3ES, 1989.
- Madjid, Nurcholish, "Sekularisasi: Belajar dari Turki dan Jepang", dalam Donald Eugene Smith, *Religion and Secularism*, terj. oleh Adzumardi Azra dengan judul; *Agama Di Tengah Sekularisasi Politik*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984.
- , "Skisme dalam Islam: Tinjauan Singkat Secara Kritis-Historis Terhadap proses Dini Perpecahan Sosial Keagamaan Islam" dalam, Budi Munawar Rahman, ed. *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 1994.
- , *Islam Kemoderenan dan Keindonesiaan: Telah Kritis atas Maslah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemoderenan*, Bandung, Mizan, 1993
- , et. al, *Syari'at Islam Yes, Syari'at Islam No*, Jakarta: Paramadina, 2000.
- Mortimer, Edward, *Islam and Power*, Trj. Oleh, Ihsan Ali Fauzi, Bnadung: Mizan, 1985.
- Nasutin, Harun, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Nor, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia: 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1996.
- , *Partai-Partai Islam di Pentas Nasional*, Jakarta: Grafitti Press, 1991.
- Raziq, Ali Abdul, *Al-Islam wa Ushulil Hukmi*, Kairo: Dar al-Kutb, 1966.

- Rahmat, Jalaluddin, "Skisme dalam Islam: Sebuah Telaah Ulang", dalam, Budi Munawar Rahman, ed. *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 1994.
- Samson, Allan A., "Islam Indonesia Sejak Orde Baru", dalam Ahmad Ibrahim at.al, (ed.), *Islam di Asia Tenggara: Perkembangan Kontemporer*, Jakarta: LP3ES, 1990
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata negara*, Jakarta: UI Press, 1992.